LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA
PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

TRIWULAN III
TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KOBA
KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Koba
Pada Hari Rabu, 2 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri Koba	**Tim Survey,**
DERIT WERDININGSIH, S.H., M.H.	**EDY YUSNADY, S.H.**
NIP. 197804302005022002	**NIP. 197609122002121004**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Koba mengadakan survey ini.

Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Koba, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Koba dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Koba.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, 2 Oktober 2024

Tim Survey

DAFTAR ISI

BAB I i
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud Dan Tujuan 1
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Rencana Kerja 2
BAB II 4
METODOLOGI 4
2.1. Metode Penelitian 4
2.2. Populasi Dan Sampel 4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 4
2.5. Teknik Analisis Data 5
2.6. Tahapan pelaksanaan 5
BAB III .....
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 8
3.1. Profil responden 8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator 8
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 19
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 21
BAB IV 24
PENUTUP 23
4.1. Kesimpulan 23
4.2. Rekomendasi 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan melalui aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (SISUPER) pada Pengadilan Negeri Koba.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

  a. Jumlah Responden.

  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan per triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat: http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk
- Pengisian Kuesioner oleh responden telah mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden kemudian Menyusun dan mencetak laporan layanan survey.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan/4 (empat) kali dalam setahun.

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental* sampling. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri dengan mengisi Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat ***http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk*** melalui komputer touchscreen yang berada di lobi depan PTSP.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka.

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu per 3 (tiga) bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang diambil dari Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvey secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas

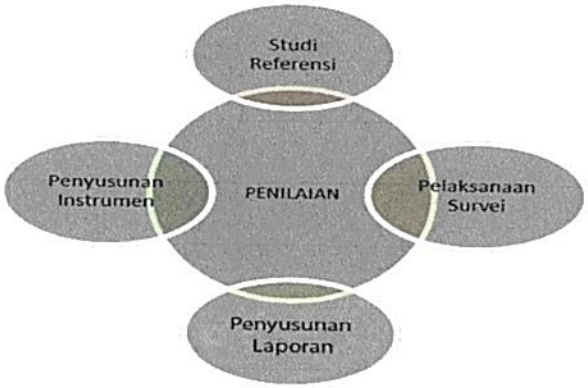

Tabel 2

Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba mayoritas memiliki latar Dasar Pendidikan SMU.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	1	10
4	**SMU**	**18**	**47,5**
5	Diploma	0	0
6	S1	16	32,5
7	S2	1	10
8	S3	0	0
10	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	**0**	**0**
Jumlah		**36**	**100%**

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 50% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Koba mememiliki pekerjaan sebagai lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	8	20,5
2	TNI	0	0
3	POLRI	2	5,5
4	SWASTA	3	7,5
5	WIRAUSAHA	3	7,5
6	TENAGA KONTRAK	9	29
7	**LAINNYA**	**11**	**40**
Jumlah		**36**	**100%**

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 40 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	14	35,00
2	29-39	16	50,00
3	40-49	6	15,00
4	50-59	0	0
6	60-69	0	0
Jumlah		**36**	**100%**

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan.

Apakah Pelayanan oleh Petugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

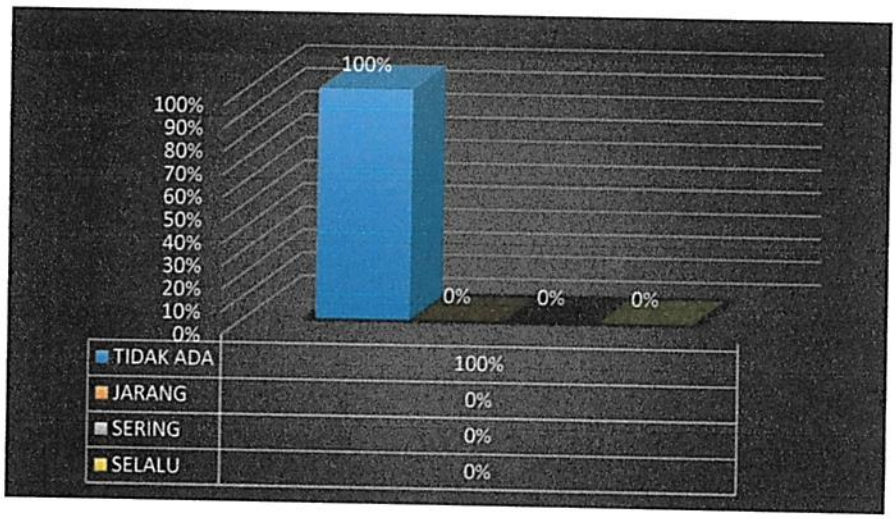

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan.

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan Secara Cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari Petugas untuk meminta imbalan tertentu?

(Penyalahgunaan Jabatan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			f	%	
1.	Tidak Ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

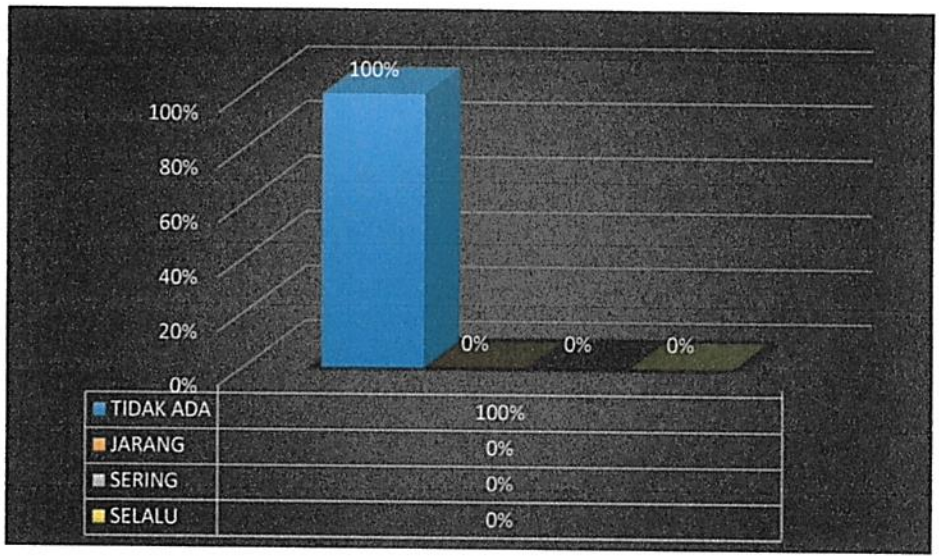

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,972 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (Karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?

(Menjual pengaruh)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	35	90	142
2.	Jarang	3	1	10	1
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**143**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**3,972**

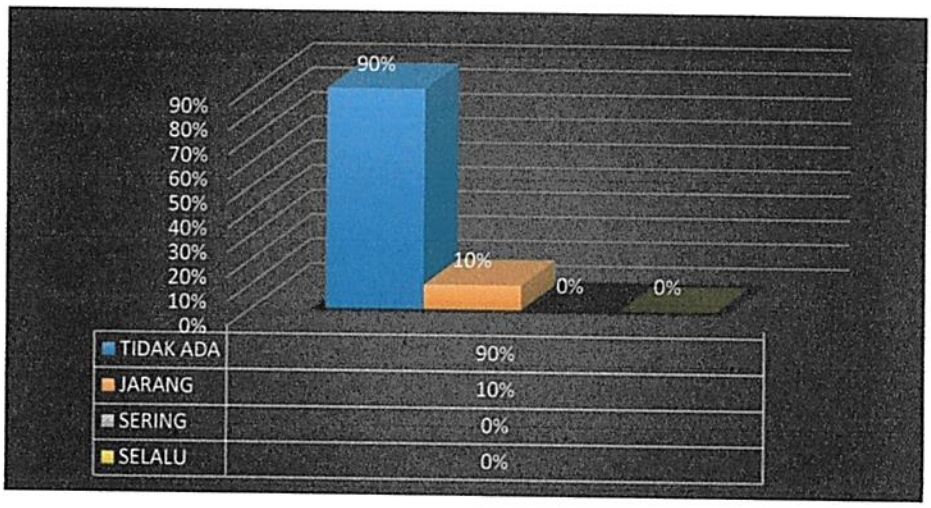

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,972 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya.

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			f	%	
1.	Tidak Ada	4	35	90	142
2.	Jarang	3	1	10	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**143**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**3,972**

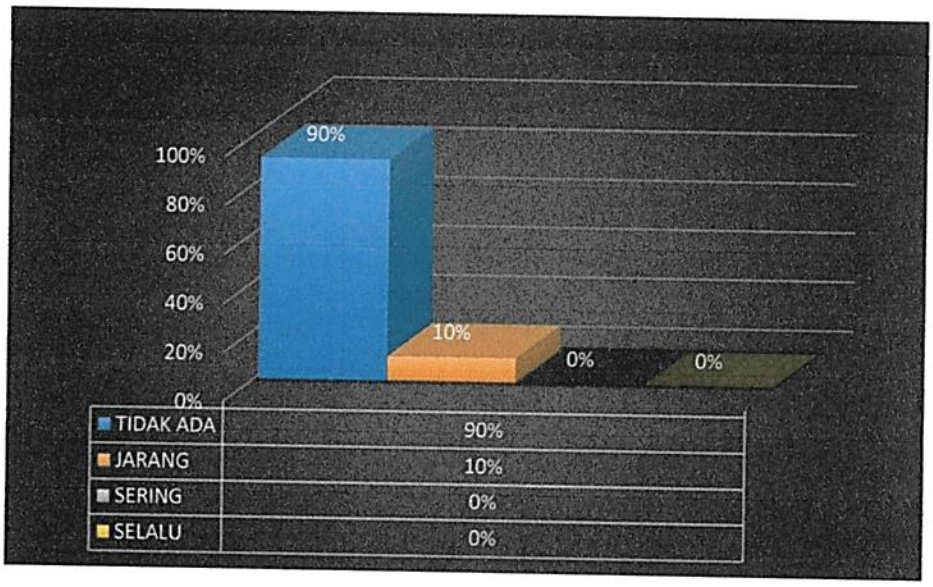

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

Apakah Selalu membayar sesuai dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

(Biaya Tambahan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**34**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

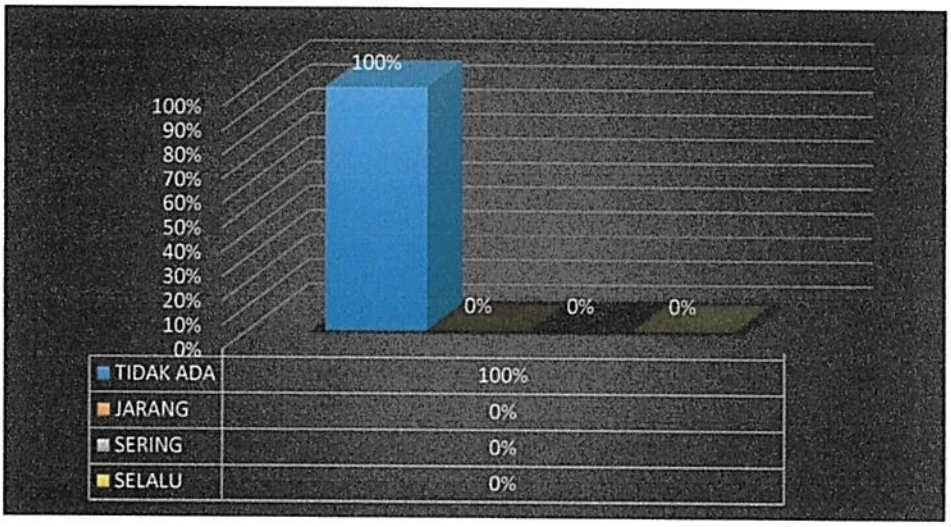

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Hadiah

Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima meskipun tidak diminta?

(Hadiah)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

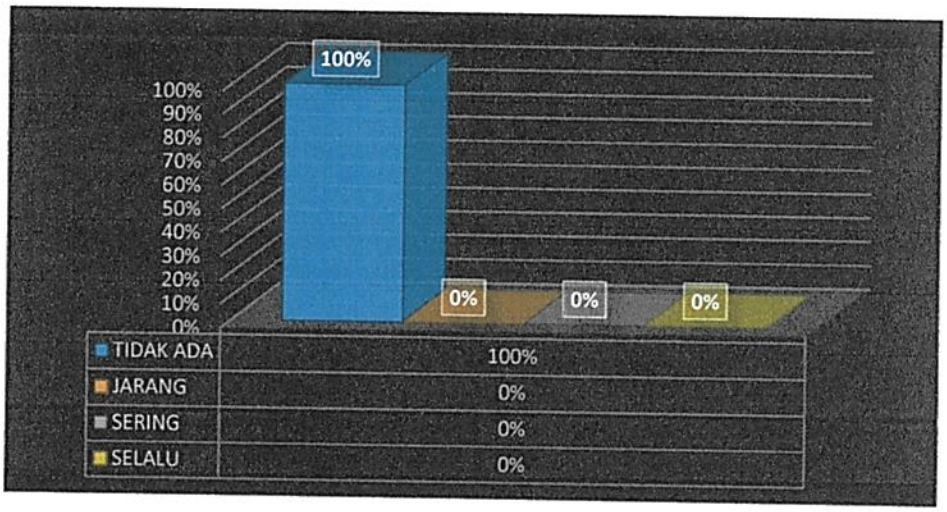

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya

Menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang sah Setelah proses Pembayaran dilakukan?

(Transparansi Biaya)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	
Jumlah			**36**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

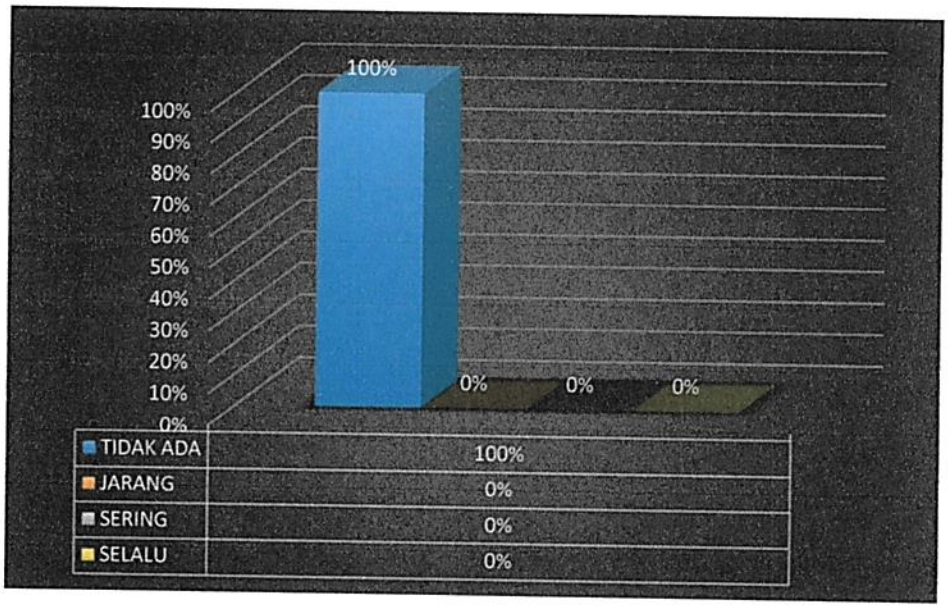

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator Percaloan

Pernah Mengetahui ada praktek Percaloan dalam pengurusan Layanan di Pengadilan?

(Percaloan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	6
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

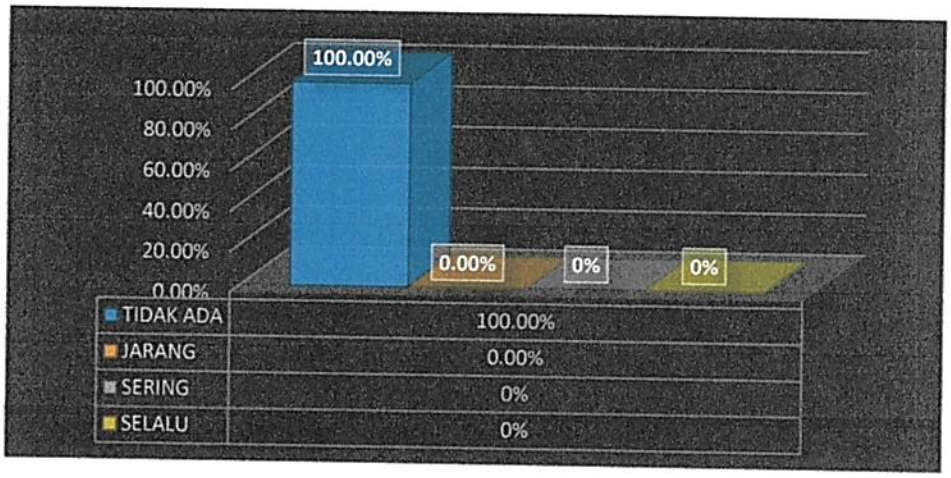

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

Pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi Praktek KKN di Pengadilan?

(Perbuatan Curang)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

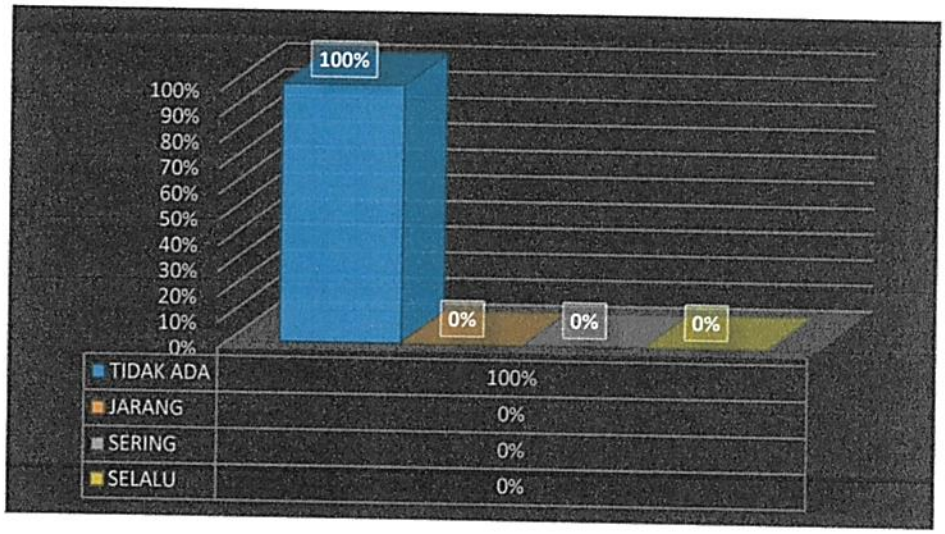

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Diluar Persidangan?

(Transaksi Rahasia)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	36	100	144
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			**36**	**100%**	**144**
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					**4,000**

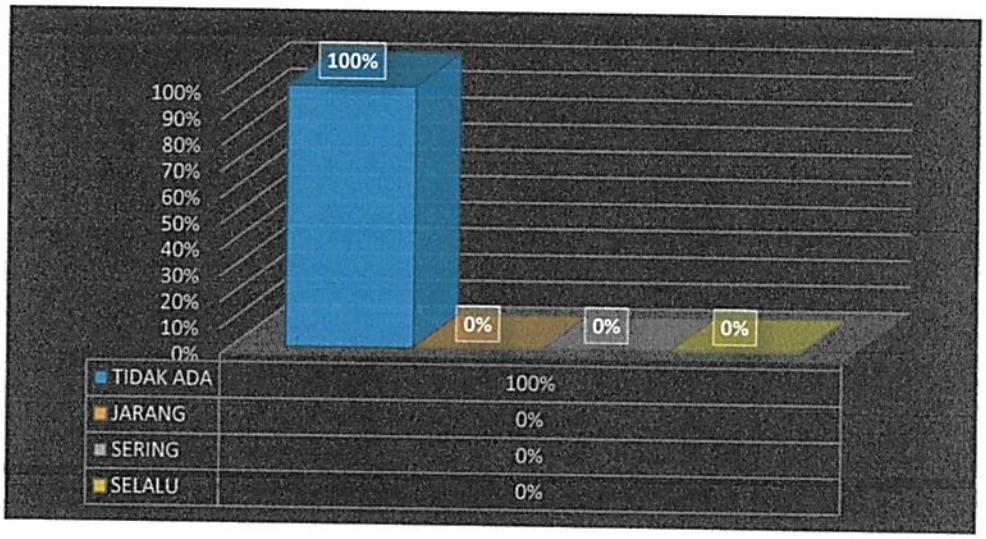

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba** sebesar **3,99 (tiga koma sembilan sembilan)** pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Tabel 17.

No	Ruang lingkup	NRR	NRR TERTIMBANG
1	Manipulasi Peraturan	4,000	0,398
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400
3	Menjual Pengaruh	3,972	0,400
4	Transaksi Biaya	3,972	0,400
5	Biaya tambahan	4,000	0,400
6	Hadiah	4,000	0,400
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,99 (tiga koma sembilan sembilan).**

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadila Negeri Koba

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

1 Pelayanan ramah dan cepat
2 Saya diberikan pelayanan yang baik
3 Sangat puas
4 Ptsp dilakukan dengan ramah dan cepat
5 Selalu cepat memberikan pelayanan
6 Baik
7 Baik
8 Baik
9 Baik
10 Bagus
11 Bagus
12 Baik
13 Baik
14 Baik
15 Bagus
16 Baik
17 Pelayanan sudah baik
18 Baik
19 Bagus
20 Bagus
21 Petugas susah memberikan pelayanan dengan cepat
22 Petugas memberikan pelayanan dengan cepat
23 Petugas memberikan informasi dengan baik
24 Petugas sudah melayani dengan baik
25 Pelayanan petugas sudah baik
26 Bagus
27 Baik
28 Baik
29 Baik
30 Petugas sudah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat
31 Petugas ptsp sudah memberikan pelayanan yang baik
32 Pelayanan yang dibeirkan sudah baik

33 Pelayanan sudah bagus
34 Petugas pada bagian pelayanan memberikan pelayanan dengan baik
35 Baik
36 Petugas memberikan informasi terkait layanan sudah sangat baik
37 Petugas pn koba sudah sangai baik memberikan layanan
38 Bagus
39 Baik
40 Baik

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Koba memiliki Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,99 (tiga koma sembilan sembilan)**/dalam skala 1- 100 maka nilai yang diperoleh **99,86 %** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh enam) persen atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1) Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000 **(3)**
2) Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000 **(1)**
3) Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,972 **(9)**
4) Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,972 **(10)**
5) Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000 **(4)**
6) Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000 **(5)**
7) Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000 **(6)**
8) Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000 **(7)**
9) Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000 **(8)**
10) Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000 **(2)**

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden **3 (tiga) nilai paling tinggi** berada pada Indikator **"Penyalahgunaan Jabatan"** mendapat indeks 4,00 disusul Indikator **"Transaksi Rahasia"** mendapat indeks 4,00 dan Indikator **"Manipulasi Peraturan"** mendapat indeks 4,00;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden **3 (tiga) nilai paling rendah** berada pada Indikator **"Perbuatan Curang"** mendapat indeks 4,000 disusul Indikator **"Menjual Pengaruh"** mendapat indeks 3,972 dan Indikator **"Transaksi Biaya"** mendapat indeks 3,972;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba triwulan ke III (Tiga) Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 sampai dengan 4,00 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator "Penyalahgunaan Jabatan" mendapat indeks 4,000 disusul Indikator "Transaksi Rahasia" mendapat indeks 4,000 dan Indikator "Manipulasi Peraturan" mendapat indeks 4,000;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada pada Indikator "Perbuatan Curang" mendapat indeks 4,000 disusul Indikator "Menjual Pengaruh" mendapat indeks 3,972 dan Indikator "Transaksi Biaya" mendapat indeks 3,972.

JADWAL PELAKSANAAN SURVEI
DI PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

No	Tahap Survey	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Triwulan 1	Pelaksanaan Survey Triwulan I	2 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	1 April 2024 s/d 3 April 2024
		Penyusunan dan Pelaporan	3 April 2024 s/d 5 April 2024
2	Triwulan 2	Pelaksanaan Survey Triwulan II	1 April 2024 s/d 30 Juni 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	1 Juli 2024 s/d 5 Juli 2024
		Penyusunan dan Pelaporan	4 Juli 2024 s/d 5 Juli 2024
3	Triwulan 3	Pelajsanaan Survey Triwulan III	1 Juli 2024 s/d 30 September 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	3 Oktober 2024 s/d 4 Oktober 2024
		Penyusunan dan Pelaporan	4 Oktober 2024 s/d 5 Oktober 2024
4	Triwulan 4	Pelajsanaan Survey Triwulan IV	1 Oktober 2024 s/d 30 Desember 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	2 Januari 2025 s/d 3 Januari 2025
		Penyusunan dan Pelaporan	3 Januari 2025 s/d 5 Januari 2025

KOMPUTER TOUCHSCREEN

Sebagai media pengguna layanan mengisi survey pada Aplikasi SISUPER BADILUM

dengan alamat

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk

DAFTAR PERTANYAAN SPAK

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
   - Tidak Sesuai Prosedur
   - Jarang Sesuai Prosedur
   - Sering Sesuai Prosedur
   - Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
   - Petugas melayani selalu meminta imbalan
   - Petugas melayani sering meminta imbalan
   - Petugas melayani jarang meminta imbalan
   - Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
   - Selalu
   - Sering
   - Jarang
   - Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
   - Tidak Pernah
   - Jarang
   - Sering
   - Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
   - Tidak Pernah
   - Jarang
   - Sering
   - Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
   - Selalu
   - Sering
   - Jarang

- Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
   - Tidak Pernah
   - Jarang
   - Sering
   - Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
   - Selalu
   - Sering
   - Jarang
   - Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
   - Selalu
   - Sering
   - Jarang
   - Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?
    - Selalu
    - Sering
    - Jarang
    - Tidak Ada